

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut (Rahima et al. 2020) “pada penelitian nya yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah” menyimpulkan bahwa nilai rasio likuiditas pada pemerintah provinsi sumatera utara dari tahun 2015-2019 cukup tinggi. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan pemerintah provinsi sumatera utara mencapai nilai standar dan lancar. Nilai rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah provinsi sumatera utara masih dari tahun 2015-2019 <25% oleh sebab itu tingkat kemandirian keuangan masih rendah sekali. Kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera utara jika dilihat dari modal kerja maka dapat dikatakan cukup baik, walaupun terjadi penurunan di tahun anggaran 2015. Terjadi selisih kurang pada tahun 2017 dan tahun 2019, hal tersebut disebabkan karena lebih besar total belanja daerah dari total pendapatan daerah.

Menurut (Zakarian dan Ashrori, 2019) “dalam penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lamongan”. diperoleh kesimpulan bahwa dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pajak daerah tergolong efisien, karena dengan biaya yang relatif sedikit pemerintah kabupaten lamongan dapat merealisasikan penerimaan PAD dan pajak daerah. Namun tingkat derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahannya masih bergantung kepada pemerintah pusat dan provinsi jawa timur.

Menurut (Farida et al. 2019) “pada penelitian yang berjudul analisis laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten subang”. diperoleh hasil bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang pada tahun 2014-2017 berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan rendah sekali, jika dilihat dari rasio keserasian belanja modal dengan belanja operasional dapat dikatakan pemerintah daerah lebih cenderung mengutamakan belanja operasional daripada belanja modal. Berdasarkan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dikatakan masih sangat rendah. Dilihat dari rasio efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisien. Namun kendati demikian kinerja keuangan pemerintah kabupaten subang tahun anggaran 2014-2017 ditinjau dari rasio efektifitas pendapatan asli daerah berjalan efektif karena persentasenya sudah diatas 100%

Menurut (Sandy et al. 2018) “pada penelitiannya yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Diperoleh hasil varian pendapatan termasuk dalam kategori baik, derajat desentralisasi masuk dalam kategori sangat kurang, rasio kemandirian keuangan daerah masuk pada kategori rendah sekali, rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan yang positif, varian belanja termasuk dalam kategori baik, rasio keserasian belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional, rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien.

Menurut (Rosida et al. 2011) “pada penelitian yang berjudul analisis laporan keuangan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota palopo menyimpulkan bahwa hasil perhitungan untuk rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah kota palopo”. kinerja keuangan pemerintah kota

palopo dalam meralisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan belum efektif karena rasio efektifitasnya belum mencapai 100%.

Menurut (Saputra et al. 2018), “penelitian yang berjudul analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di kabupaten jembran tahun anggaran 2010 – 2014”. Menyimpulkan bahwa dilihat dari analisis varians, pendapatan termasuk dalam kategori baik., dilihat dari rasio derajat desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Ini menandakan bahwa peranan pemerintah pusat masih sangat dominan. Dilihat dari pertumbuhan pendapatan dikategorikan pertumbuhannya positif kaerah pemerintah daerah mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian dari tahun sebelumnya.

2.2 Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dan Govindam pada Siagian (2011) konsep *agency theory* adalah hubungan antara *Principal* dan *Agent*. *Principal* memperkerjakan *agent* untuk menjalankan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk didalam nya pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Perspektif hubungan keagenan digunakan sebagai dasar untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. (Meckling dan Jansen dalam siagian 2011) menyebutkan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara manajer dengan pemegang saham. Hubungan inilah yang sering

menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham, dimana pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing – masing tujuan mereka terpenuhi. Hal ini memunculkan konflik kepentingan pemegang saham menginginkan *return* yang besar dan cepat, sedangkan manajer menginginkan kompensasi sebesar – besarnya atas kinerja yang telah dilakukan.

2 Pemerintah Daerah

Pasal 18 (5) Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Pemerintah Daerah adalah Daerah otonom yang dapat menjalankan kegiatan pemerintahan dengan seluas – luasnya serta memiliki hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali kegiatan pemerintahan yang diatur oleh undang – undang ditentukan sebagai wewenang pemerintah pusat”

Dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 (2) dijelaskan bahwa :“Pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan di daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

Menurut Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengurus dan mengatur kegiatan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seutuhnya, kecuali yang berkaitan dengan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dimana hubungan tersebut

meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas, anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran serta membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan”.

Menurut Tantri (2022), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

5. Fungsi APBD

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat pasal 66 ayat 3, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. *Fungsi Otorisasi*, berarti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan Pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
- b. *Fungsi Perencanaan*, memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- c. *Fungsi pengawasan*, berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- d. *Fungsi alokasi*, berarti bahwa anggaran daerah untuk mengurangi pemborosan dan pemborosan sumber daya dan meningkatkan efisiensi serta efektifitas perekonomian.
- e. *Fungsi distribusi*, berarti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. *Fungsi stabilisasi*, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

6. Keuangan Daerah

Menurut Halim (2001) “mendefinisikan Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian halnya dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang maupun barang yang bisa dijadikan kekayaan daerah sepanjang hal itu belum dimiliki atau dikuasi oleh daerah yang lebih tinggi dan juga pihak – pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku”.

7. Fungsi Keuangan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi seluruh kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah, azas umum

dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam mengelola keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta memperhatikan azas keadilan, kepastian dan manfaat untuk masyarakat.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 181 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 17 – 18, yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran yang tersedia, rencana kerja Pemerintah daerah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa APBD memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Otorisasi, dimana bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berjalan.
2. Fungsi perencanaan, memiliki arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan ditahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan berarti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman penilaian apakah kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.
4. Fungsi Alokasi, memiliki arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian.

8. Dasar Hukum Keuangan Daerah

Memperjelas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Pemerintah membuat undang – undang sebagai dasar hukum keuangan daerah sebagai berikut :

- a. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- b. UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang fungsi Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah
- c. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- d. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelola dan tanggung-jawab keuangan negara
- e. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

“Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat dan memiliki keleluasaan didalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas yang ditentukan oleh perundang-undangan”, Syamsi (1986).

Menurut Mahsun (2012), “kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program maupun kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi”.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

10. Definisi Laporan Keuangan

Menurut Ramli (2016) “dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu”.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, “Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai baposisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan”.

Menurut Suteja (2018) “Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang dipergunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak yang memiliki kepentingan”.

11. Tujuan dan Fungsi laporan Keuangan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1. “Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang memiliki manfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara lebih rinci, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan” :

- a. Menyediakan Informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.

12. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016), “pemerintah daerah terus berupaya memperbaiki kualitas laporannya”. Laporan keuangan disajikan pemerintah daerah dinilai berkualitas apabila memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Relevan, artinya informasi dalam laporan keuangan yang disajikan memberikan manfaat bagi para pengguna untuk pengambilan keputusan.

Relevansi laporan keuangan terkait dengan:

- a. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi, yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
- b. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang.
- c. Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu . laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan.

2. Andal, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

Laporan keuangan yang andal memiliki cirri berikut:

- a. Disajikan secara jujur, yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
- b. Dapat diverifikasi, yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat di verifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan
- c. Netral dalam penyajian, yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat dibandingkan, artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembanding kinerja masalah atau pembanding kinerja organisasi lain yang sejenis.

4. Dapat dipahami, artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

Menurut Ramli (2016:10), “karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”.

1. Relevan, laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan

memprediksi masa depan, serta menengaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Informasi relevan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki manfaat umpan balik, informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif, informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2. Lengkap, informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam pengguna informasi tersebut dapat dicegah.

3. Andal, informasi dalam laporan keuangan harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kelainan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajian tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur peristiwa Lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

4. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laaporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal, dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi sebelumnya, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan pada laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

13. Komponen Laporan Keuangan dan Elemen nya

1. Neraca.

Menurut PSAP Nomor 01, “Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas (Pemerintah Daerah) pada suatu titik waktu”.

a. Aset

Menurut PSAP Nomor 01, “aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya”.

Aset dibagi menjadi dua golongan yaitu aset lancar dan nonlancar. Suatu aset digolongkan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau segera bisa dipakai atau dijual dalam kurun waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat digolongkan pada kriteria tersebut merupakan aset nonlancar. Menurut Mahmudi (2016:69), aset lancar meliputi :

1. Kas dan setara kas, meliputi :
 - a. Kas direkening kas umum daerah
 - b. Kas di bendahara penerimaan
 - c. Kas di bendahara pengeluaran
2. Investasi jangka pendek, meliputi :
 - a. Deposito jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan
 - b. Wesel jangka pendek
 - c. Surat berharga saham untuk di perjual belikan
3. Piutang, meliputi :
 - a. Piutang pajak
 - b. Piutang retribusi
 - c. Piutang denda
 - d. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran
 - e. Bagian lancar tuntutan perbendaharaan
 - f. Bagian lancar tuntutan ganti rugi/
 - g. Piutang lainnya
4. Persediaan, meliputi :
 - a. Barang pakai habis kantor
 - b. Barang tak habis pakai kantor

c. Obat-obatan

d. Mesin dan peralatan untuk bantuan masyarakat

Aset nonlancar meliputi aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar dibagi menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu tertentu (lebih dari satu periode akuntansi). Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Menurut Mahmudi (2016:70) sebagai berikut :

1. Investasi nonpermanen antara lain :
 - a. Investasi dalam surat utang negara
 - b. Investasi dalam proyek pembangunan
 - c. Investasi dalam surat obligasi pemerintah daerah lain
 - d. Pinjaman jangka panjang kepada perusahaan daerah
2. Investasi permanen antara lain :
 - a. Penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah dalam kemitraan
 - c. Investasi permanen lainnya

3. Aset tetap antara lain :
 - a. Tanah
 - b. Peralatan dan mesin
 - c. Gedung dan bangunan
 - d. Jalan, Irigasi, dan jaringan

b. Dana Cadangan

Menurut PSAP nomor 01, “dana cadangan merupakan dana yang disisihkan penggunaannya, sebagaimana dimaksud untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan dan pembentukannya”.

Jenis-jenis dana cadangan (Mahmudi, 2006:71) :

- a. Dana cadangan untuk pembangunan infrastruktur
- b. Dana cadangan untuk investasi permanen
- c. Dana cadangan untuk pelunasan utang jangka panjang belum jatuh tempo

c. Kewajiban

Menurut PSAP Nomor 01, “Karakteristik esensial kewajiban adalah pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang ada datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang”. Menurut Mahmudi (2016:72) kewajiban jangka pendek meliputi :

1. Utang transfer
2. Utang gaji pegawai
3. Utang perhitungan pihak ketiga
4. Utang bank
5. Utang jangka pendek lainnya.

Menurut Mahmudi (206:73) kewajiban jangka panjang meliputi :

1. Utang jangka panjang daerah kepada pemerintah pusat
2. Utang jangka panjang kepada lembaga keuangan bank
3. Utang Obligasi pemerintah daerah
4. Utang jangka panjang lainnya.

d. Ekuitas

Menurut PSAP Nomor 01, “ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas”.

2. Laporan Arus Kas

Menurut PSAP Nomor 03, “Laporan Arus kas Laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas”. Menurut Mahmudi (2016:78) Klasifikasi tersebut sebagai berikut :

a. Arus kas dari aktivitas operasi, antara lain :

1. Pendapatan pajak
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Dana bagi hasil pajak
6. Dana Alokasi umum
7. Dana alokasi khusus
8. Dana penyesuaian

Arus kas keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Bunga
4. Subsidi
5. Bagi Hasil pendapatan lainnya

b. Arus kas dari aktivitas investasi Non-Keuangan meliputi :

1. Pendapatan Penjualan Aset tetap – Tanah
2. Pendapatan Penjualan Aset tetap – Peralatan dan Mesin
3. Pendapatan Penjualan Aset tetap – Gedung dan Bangunan
4. Pendapatan penjualan Aset tetap lainnya

Arus kas keluar dari aktivitas investasi sebagai berikut :

1. Belanja Modal - Tanah
2. Belanja Modal – Peralatan dan Mesin

3. Belanja Modal – Gedung dan Bangunan

4. Belanja Modal – Aset Lainnya

c. Arus kas dari aktivitas pembiayaan sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Cadangan

2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3. Penerimaan Hasil Privatisasi Perusahaan Daerah

4. Pinjaman Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat

5. Pinjaman Dalam Negeri Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

6. Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bank

7. Pinjaman Dalam Negeri kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

8. Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi Pemerintah Daerah

9. Pinjaman Dalam Negeri Lainnya

10. Penerimaan kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara

11. Penerimaan kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

12. Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah

Lainnya

13. Penerimaan kembali Pelunasan Obligasi Pemerintah Daerah-

Lain

14. Penerimaan Kembali Investasi dalam Surat Utang Negara

Arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan meliputi :

1. Pembentukan Dana Cadangan

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada pemerintah pusat
4. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada pemerintah Daerah Lainnya
5. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri kepada lembaga Keuangan Bank
6. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Kepada lembaga Keuangan Bukan Bank
7. Pemabayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi pemerint Pemerintah Daerah
8. Pembayaran Pokok Pijaman Dalam Negeri Lainnya
9. Pemebrian Pinjaman kepada Perusahaan Negara
10. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah
11. Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
12. Pengeluaran untuk Investasi dalam Surat Utang Negara
13. Pengeluaran untuk Investasi dalam Proyek Pembangunan
14. Pengeluaran untuk Investasi dalam Kemitraan
15. Pengeluaran untuk Investasi Jangka Panjang Lainnya

d. Arus kas dari aktivitas transitoris

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
2. Kiriman uang masuk

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Pihak ketiga

2. Kiriman uang keluar

Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam melakukan evaluasi perubahan kekayaan bersih suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah

3. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PSAP Nomor 02, “Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Menurut Mahmudi (2016:73) “Unsur yang termasuk laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan”.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Menurut PSAP Nomor 04, “catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk tujuan umum”.

5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, lampiran I.01 “menyatakan bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

6. Laporan Operasional

Menurut PSAP Nomor 12. “menyatakan bahwa Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan, unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa”.

7. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran 1.01. “Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

14. Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah

“Pengguna laporan keuangan perlu memahami langkah-langkah yang efektif untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah secara tepat dan menyeluruh”, Mahmudi (2016). Tahapan dalam menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut :

1. Menilai kinerja makro

Mahmudi (2016), “langkah pertama dalam menganalisis laporan keuangan adalah menilai kinerja makro pemerintah daerah. Ini sangat penting sebab keberhasilan atau kegagalan dalam kinerja makro sangat berkaitan dengan laporan

keuangan yang merupakan gambaran dari kinerja mikro”. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut :

- a. Ekonomi : Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapit dan tingkat inflasi daerah
- b. Kesehatan : Angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan status gizi buruk.
- c. Pendidikan : Angka melek huruf dan tingkat pendidikan, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah.
- d. Kependudukan : Jumlah penduduk miskin, Laju pertumbuhan penduduk, indeks pembangunan manusia.
- e. Ketenagakerjaan : Tingkat pengangguran, jumlah pekerja anak
- f. Taraf dan pola konsumsi : konsumsi eneeegi dan protein per kapita per hari, pengeluaran per kapita per bulan
- g. Perumahan dan lingkungan : kualitas rumah tinggal dan tingkat polusi
- h. Keamanan dan ketertiban : Angka kriminalitas dan jumlah konflik sosial
- i. Pemerintahan : indeks *Good gzovernance*, Indeks korupsi, Indeks kepuasan pelayanan

2. Menilai kinerja keuangan

Mahmudi (2016). “Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, Laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas, laporan keuangan dapat

dianalisis untuk memberikan gambaran kinerja keuangan, analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menginterpretasikan angka dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menilai keuangan dimana hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik”.

15. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Teknis Analisis Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2016:90) “analisis laporan keuangan memerlukan teknik tertentu agar kegiatan analisis tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan”. Beberapa teknis dalam menganalisis laporan keuangan antara lain :

1.1 Analisis Varian (Selisih)

Analisis Varians atau selisih pada dasarnya digunakan untuk menganalisa laporan realisasi anggaran, dilakukan dengan cara mengevaluasi selisih antara anggaran dan realisasi. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam analisis varians adalah menentukan tingkat signifikansi selisih anggaran, menentukan tingkat varians anggaran yang bisa ditoleransi, mencari penyebab terjadinya selisih anggaran

1.2 Analisis rasio keuangan

Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi yang sejenis lainnya. Jenis analisis rasio keuangan, antara lain :

a. Analisis aset

b. Analisis likuiditas :

1. Rasio lancar

2. Rasio kas

3. Rasio cepat

4. Rasio modal kerja terhadap total aset

c. Analisis Solvabilitas

d. Analisis kewajiban :

1. Rasio total utang terhadap ekuitas

2. Rasio total utang terhadap Aset modal

3. Rasio total utang terhadap pendapatan

e. Analisis Ekuitas

f. Analisis Profitabilitas:

1. *Profit Margin*

2. *Return on Asset*

3. *Return on investment*

4. *Return on Equity*

5. *Return on Capital Employed*

6. *Net Income*

1.3 Analisis pertumbuhan

Analisis pertumbuhan (*trend*) dilakukan guna mengetahui kecenderungan berupa kenaikan ataupun penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu.

1.4 Analisis regresi

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk menguji variable independen terhadap variable dependen. Analisis ini bermanfaat bagi periset kebijakan publik dimana hasil dari analisis ini dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah.

1.5 Analisis Prediksi

Data laporan keuangan dapat digunakan untuk menganalisis proyeksi. Contohnya untuk memproyeksikan pendapatan tahun depan dapat menggunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai dasar proyeksi. Demikian halnya untuk proyeksi belanja dapat menggunakan data dari laporan keuangan

16. Analisis Aset

“Aset pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah”, Mahmudi (2016). Analisis aset dalam dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Membandingkan nilai pada tiap pos dalam neraca tahun sekarang dengan tahun sebelumnya atau lebih. Pos-pos tersebut diantaranya : Pertumbuhan aset lancar, pertumbuhan investasi jangka panjang, pertumbuhan aset tetap, pertumbuhan dana cadangan dan pertumbuhan aset lainnya

b. Menghitung prosentase pada masing-masing kelompok aset dengan total aset. Selain analisis terhadap pertumbuhan masing-masing pos dalam neraca, analisis proporsi bermanfaat dalam melihat gambaran aset pemerintah daerah secara menyeluruh.

c. Menghitung modal kerja milik pemerintah daerah. Dari informasi neraca yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah, pembaca dapat membuat analisis modal kerja pemerintah daerah. Perhitungan modal kerja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Modal kerja} = \text{Aset lancar} - \text{Kewajiban Lancar}$$

d. Menghitung rasio keuangan terkait dengan aset analisis rasio keuangan yang digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain :

1. Rasio Likuiditas :

Menurut Mahmudi (2016). “Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, untuk melakukan analisis likuiditas ada beberapa metode yang dapat dipelajari”, antara lain :

a. Rasio Lancar

Perbandingan antara aktiva lancar milik pemerintah daerah pada tanggal neraca dengan utang jangka pendek. Rasio lancar dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{utang Lancar}}$$

b. Rasio Kas

Membandingkan antara kas dalam pemerintah daerah ditambah efek yang dapat diuangkan dibagi dengan utang lancar. Rasio ini dirumuskan seperti dibawah ini :

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Efek}}{\text{utang lancar}}$$

c. Rasio Cepat (Quick Ratio)

Perbandingan antara aktiva lancar setelah dikurangi persediaan dengan utang lancar. Rasio ini mengindikasikan bagaimana pemerintah daerah dapat membayar utangnya dengan cepat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. Rasio modal kerja terhadap total aset

rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan podisisi modal kerja neto. Ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio modal kerja} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{utang Lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

e. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang, Mahmudi (2016). Rasio solvabilitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Solvabilitas} = \frac{\text{Total Aktiva}}{\text{Total Hurang}}$$

f. Rasio utang

Menurut Mahmudi (2016) “rasio ini penting bagi kreditur dan para calon kreditur potensial pemerintah daerah dalam mengambil keputusan pemberian kredit. Rasio ini dipergunakan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya”.

1. Rasio utang terhadap aset modal

dipergunakan untuk mengetahui bagian dari aset modal yang dapat dipergunakan untuk menjamin utang. Rasio ini lebih cocok dipergunakan sektor bisnis, sedangkan untuk sektor publik tidak

terlalu relevan, dikarenakan jika terjadi likuidasi kreditur bisa mengklaim aset modal perusahaan. Sementara pemerintah tidak di rancang untuk dilakukan likuidasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio utang terhadap aset modal} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset modal}}$$

17 Analisis kewajiban dan Ekuitas

1. Penggolongan Kewajiban

Menurut Mahmudi (2016), “kewajiban atau utang di bedakan menjadi dua jenis, yaitu : utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Disebut utang jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Namun apabila lebih dari 12 (dua belas) bulan maka disebut utang jangka panjang”.

2. Analisis utang pemerintah daerah

Mahmudi (2016). “Dari informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah, pembaca laporan keuangan dapat melakukan beberapa analisa utang pemerintah daerah”, yaitu :

a. Analisis pertumbuhan utang

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan utang pemerintah daerah setiap tahun. Pertumbuhan utang wajib dikendalikan agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi suatu daerah kabupaten / kota.

b. Analisis rasio utang per kapita

Dari informasi laporan keuangan neraca, pembaca laporan keuangan dapat menganalisis rasio utang per kapita. Rasio ini memerlukan data jumlah penduduk daerah setempat. Rasio utang per kapita adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio utang per kapita} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Jumlah Penduduk}}$$

c. Analisis rasio utang terhadap ekuitas

Rasio ini memberikan indikasi seberapa bagian dari ekuitas yang diperlukan untuk mendanai utang. Analisis ini penting untuk mengetahui struktur pembiayaan pemerintah daerah. Rumus dari rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio utang terhadap ekuitas} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

d. Analisis Rasio bunga utang terhadap Pendapatan Asli Daerah

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui besarnya kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dengan Pendapatan Asli Daerah. rasio ini memiliki rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

$$\text{Rasio utang terhadap PAD} = \frac{\text{Bunga utang Jangka Panjang}}{\text{PAD}}$$

e. Analisis Rasio utang terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rasio ini berguna untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajiban berdasarkan kemampuan produktivitas yang dimiliki masing-masing daerah. Rasio ini memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Bunga utang terhadap PDRB} = \frac{\text{Total utang}}{\text{PDRB}}$$

f. Analisis Rasio utang terhadap pendapatan pajak

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan pajak yang diterima. Semakin rendah rasio ini berarti memiliki kemampuan membayar utang dengan baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio utang Terhadap Pajak Daerah} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}}$$

g. Analisis Rasio utang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membayar kembali utangnya dengan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka akan semakin baik. Dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio utang terhadap PAD} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

h. Analisis Rasio utang terhadap total pendapatan daerah

Semakin rendah nilai rasio ini maka semakin baik. Pemberi pinjaman akan menilai rasio utang terhadap total pendapatan daerah. rasio ini dikatakan baik jika nilainya berkisar 20% sampai 40%, apabila lebih dari 40% akan dikategorikan sangat jelek, antara 10% sampai 20% cukup baik, jika dibawah 10% berarti sangat baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio utang terhadap pendapatan daerah} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

3. Analisis Ekuitas

Menurut Mahmudi (2016) menyebutkan bahwa, “Informasi ekuitas dana bermanfaat untuk mengetahui kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah”. beberapa analisis laporan keuangan berkaitan dengan ekuitas antara lain :

a. Rasio utang terhadap Ekuitas

$$\text{Rasio utang terhadap Ekuitas} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Jumlah Ekuitas}}$$

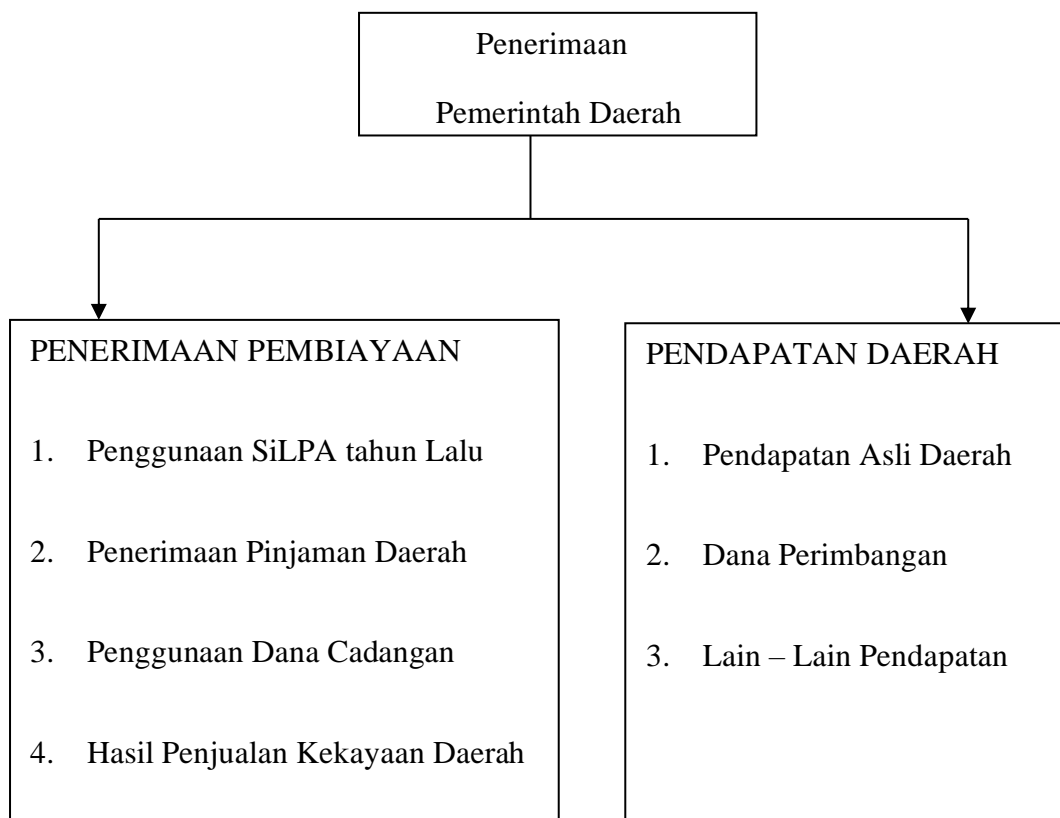
b. Rasio Kecukupan Ekuitas

Berdasarkan informasi laporan keuangan neraca, dapat melakukan analisis struktur ekuitas. Analisis ini bermanfaat untuk mengetahui proporsi dari utang terhadap ekuitas.

18. Analisis Pendapatan

Memurut Mahmudi (2016) “menyatakan bahwa pendapatan dapat dipahami sebagai hak pemerintah daerah yang menambah kekayaan bersih akibat transaksi masa lalu”. Pendapatan pemerintah daerah berbeda dengan penerimaan pemerintah daerah. untuk lebih memahami perhatikan gambar berikut :

Gambar 2.1 Skema Penerimaan Pemerintah Daerah



Sumber : Mahmudi (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Mahmudi (2016) menyatakan bahwa melalui laporan realisasi anggaran dapat menganalisis pendapatan daerah diantaranya dengan cara :

1. Analisis Varians anggaran pendapatan

Analisis ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran. Dalam melakukan analisis selisih anggaran pendapatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembaca laporan adalah sebagai berikut :

- a. Melihat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang dicapai baik secara nominal maupun prosentase.
- b. Menentukan tingkat selisih yang bisa ditoleransi atau di anggap wajar
- c.. Menilai signifikan atau tidak selisih tersebut jika di tinjau dari total pendapatan
- d. Melakukan analisa penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan pemerintah daerah. kinerja pendapatan dikatakan baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah anggaran pendapatan yang telah di tetapkan sebelumnya.

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Analisis ini memiliki manfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah di tahun anggaran bersangkutan kinerja keuangannya mengalami pertumbuhan secara positif ataupun negatif. Pertumbuhan pendapatan pada tahun tertentu dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan tahun (t-1)}}{\text{Pendapatan tahun (t-1)}} \times 100\%$$

3. Menghitung rasio keuangan, dengan cara antara lain :

a. Rasio Kemandirian Daerah

Jika angka rasio ini semakin tinggi maka pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan yang baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Rasio Kemandirian

Kemampuan Keuangan	Prosentase
Tinggi	75 – 100%
Sedang	50 – 74%
Rendah	25 – 49%
Rendah Sekali	0 – 24%

Sumber : *Halim*. Akuntansi Sektor Publik-
Akuntansi Keuangan Daerah

b. Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah

Semakin tinggi rasio ketergantungan daerah maka semakin besar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total Pendatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Rasio Ketergantungan Pemerintah Daerah

Kategori	Prosentase Ketergantungan
Sangat Tinggi	>50%
Tinggi	40 – 49%
Cukup Tinggi	30 – 39%
Sedang	20 – 29%
Rendah	10 – 19%
Sangat Rendah	0 – 9%

Sumber : Bangsa (2017)

c. Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Rasio ini memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. 3 Kriteria Derajat Desentralisasi

Kategori	Prosentase Desentralisasi
Sangat Kurang	<10%
Kurang	10 – 19%
Cukup	20 – 29%
Sedang	30 - 39%
Baik	40 – 50%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam (Tan, 2010)

d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan Pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pendapatan}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 4 Kriteria Rasio Efektivitas

Kategori	Prosentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90-99%
Kurang Efektif	75-89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (2996)

e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan pajak daerah sesuai jumlah penerimaan pajak yang ditargetkan. Rasio ini dikatakan baik jika mencapai angka minimal 1 atau 100%. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Tabel 2. 5 *Prosentase Efektivitas Pajak Daerah*

Kriteria	Prosentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	90 – 100%
Cukup Efektif	80 – 90%
Kurang Efektif	60 - 80%
Tidak Efektif	<60%

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (2006)

f. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini memiliki manfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 6 *Prosentase* Kontribusi

Kriteria	Prosentase
Sangat Baik	>50%
Baik	41 – 50%
Cukup Baik	31 – 40%
Sedang	21 – 30%
Kurang	11 – 20%
Sangat Kurang	0 – 10%

Sumber :Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (2006)

g. Rasio utang terhadap pendapatan daerah

Pada rasio ini, semakin rendah nilai-nya maka semakin baik. Dinyatakan baik apabila nilainya 20% sampai 40%, apabila diatas 40% maka di ketegorkan sangat jelek, antara 10% sampai 20% dikatakan cukup baik, dan apabila dibawah 10% dikatakan sangat baik. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio tang terhadap pendapatan dearah} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

4. Menilai potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, meliputi

a. Analisis Potensi Pajak Daerah

b. Potensi Retribusi Daerah

19. Analisis Belanja

Menurut standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dalam tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016). Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana pemerintah daerah menggunakan APBD secara tepat. Berdasarkan informasi laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis belanja daerah antara lain :

1. Analisis Varian Belanja

Analisis ini merupakan analisis terhadap perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu selisih disukai (*favourable variance*) dan selisih tidak disukai (*unfavourable variance*). Dalam hal ini realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya maka disebut *favourable variance*, dan jika realisasi belanja lebih besar dari anggarannya maka disebut *unfavourable variance*.

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi belanja tahun } t - \text{realisasi belanja tahun } t-1}{\text{Realisasi belanja tahun } t-1}$$

3. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini berguna untuk mengetahui keseimbangan antara belanja, terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Agar fungsi ini berjalan dengan baik, pemerintah daerah perlu mengharmonisasikan belanja. Analisis keserasian belanja antara lain sebagai berikut :

a. Analisis Belanja per fungsi terhadap total belanja

Analisis ini penting untuk menganalisa pola dan orientasi pengeluaran pemerintah daerah. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

b. Analisis Belanja operasi terhadap total belanja

Analisis ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tentang porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu 60-90%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

c. Analisis Belanja modal terhadap total belanja

Dari rasio ini pembaca laporan keuangan mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 2-5%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio belanja modal terhadap total Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

d. Analisis Belanja langsung dan tidak langsung

Rasio ini bermanfaat untuk manajemen internal pemerintah daerah, yaitu untuk pengendalian biaya dan anggaran. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Rasio Belanja Langsung :

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Rasio Belanja Tidak Langsung :

$$\text{Rasio Belanja tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja tidak langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

4. Rasio Belanja terhadap PDRB

Rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektifitas belanja daerah, rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Daerah} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

20. Analisis Pembiayaan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya dan dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran. Menurut Mahmudi (2016) analisis pembiayaan adalah sebagai berikut :

a. Analisis Penggunaan SiLPA tahun lalu

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pos ini akan menjadi alternatif pertama yang digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Secara teoritis SiLPA dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

b. Analisis pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan

Analisis ini meliputi analisis pembentukan dana cadangan dan analisis penggunaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat dilakukan apabila terjadi surplus anggaran dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Analisis pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk mengevaluasi hal-hal sebagai berikut :

1. Tujuan Pembentukan Dana Cadangan

2. Jumlah besaran dana cadangan yang direncanakan

Dilain sisi penggunaan dana cadangan dilakukan apabila terjadi defisit anggaran. Cara ini merupakan alternatif setelah defisit tidak cukup ditutup dengan memanfaatkan SiLPA tahun lalu.

Saldo Akhir dana cadangan yang dilaporkan pada neraca dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Saldo Akhir Dana Cadangan} = \text{Saldo Awal Dana Cadangan} + (\text{Pembentukan Dana Cadangan} - \text{Penggunaan Dana Cadangan})$$

c. Analisis Investasi

Investasi yang dilakukan pemerintah daerah memiliki tujuan yang berbeda dengan sektor bisnis, yaitu hanya bersifat menambah penerimaan daerah, tidak untuk berspekulasi bisnis. Analisis pemanfaatan dana surplus untuk investasi dilakukan untuk mengevaluasi hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat ekonomi, sosial, dan politik dari investasi yang akan diperoleh dimasa yang akan datang
2. Pemilihan instrumen investasi dikaitkan dengan tingkat resiko
3. sifat investasi, apakah investasi permanen ataukah non permanentt
4. Janga waktu investasi

d. Analisis Divestasi dan Privatisasi

Divestasi adalah pelepasan semua modal pemerintah daerah kepada masyarakat maupun pihak swasta sehingga pemiliknya berpindah. Dan

privatisasi adalah pelepasan sebagian proporsi kepemilikan modal pemerintah daerah. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi tentang:

1. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung atas keputusan investasi

Atau privatisasi

2. Tujuan dibalik divestasi dan privatisasi

3. kewajaran mekanisme atau prosedur divestasi dan privatisasi

4. Nilai strategis kebijakan divestasi dan privatisasi

e. Analisis Piutang Daerah

Analisis piutang digunakan untuk mengevaluasi tentang kelayakan pemberian piutang jangka waktu pengembalian, risiko dan manfaat yang diperoleh. Pemberian piutang perlu memperhatikan tingkat piutang saat ini yang dimiliki, kerugian piutang tak tertagih dan kecukupan modal kerja

f. Analisis Pinjaman Daerah

Keputusan pembiayaan melalui pinjaman daerah wajib dikaji dan dievaluasi secara cermat oleh eksekutif dan legislatif. Analisis pinjaman ini dilakukan untuk mengevaluasi hal-hal sebagai berikut :

1. Kelayakan pengadaan pinjaman

2. Tujuan dan Manfaat pinjaman secara ekonomi, sosial dan politik

3. Kemampuan fiskal daerah dan kesinambungan fiskal daerah

21. Analisis Laporan Arus Kas

Menurut Mahmudi (2016). Laporan arus kas merupakan informasi keuangan yang sangat penting bagi manajemen maupun pengguna laporan keuangan eksternal. Laporan arus kas memberikan manfaat sebagai berikut :

1. untuk mengetahui penyebab terjadinya surplus atau defisit
2. untuk memprediksi fiskal pemerintah daerah dimasa datang
3. untuk memprediksi kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik

Laporan arus kas juga mempunyai beberapa teknik untuk melakukan analisis

laporan arus kas, diantaranya :

1. Analisis Pertumbuhan Arus Kas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan kas dari masing-masing aktivitas selama beberapa tahun. Pertumbuhan arus kas dapat digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Menilai bagus atau tidaknya fundamental fiskal pemerintah daerah
- b. Menilai, mengevaluasi dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan daerah
- c. Memperbaiki manajemen arus kas di masa depan

2. Analisis Laporan arus kas untuk setiap komponen antara lain:

- a. Analisis arus kas dari aktivitas operasi

Mencatat keluar masuk kas untuk kegiatan operasional pemerintah daerah. Kas dari operasi digunakan untuk mengukur jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dilakukannya aktivitas operasional pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jika arus kas bersih dari aktivitas operasi bersaldo positif, maka hal itu mengindikasikan kemandirian dana yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan operasional

b. Analisis arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan.

Arus kas dari aktivitas investasi yang bersaldo negatif menunjukkan pemerintah daerah pada tahun tersebut telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penjualan aset tetap. Sebaliknya, arus kas dari aktivitas investasi bersaldo positif, maka hal itu menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan investasi aset tetap secara agresif dan juga menunjukkan kecenderungan terjadi pelepasan aset tetap.

c. Analisis arus kas dari aktivitas pembiayaan

Menunjukkan arus kas berkaitan dengan struktur ekuitas pemerintah daerah, yaitu ekuitas dana dan kewajiban. Arus kas dari aktivitas pembiayaan yang bersaldo positif menggambarkan adanya masalah keuangan di pemerintah daerah. Sebaliknya arus kas dari pembiayaan yang memiliki nilai saldo negatif mengindikasikan kesehatan keuangan yang

cukup baik, dimana terjadi surplus dana sehingga kelebihan dana tersebut dimanfaatkan menambah dana cadangan.

d. Analisis arus kas bebas

Arus kas ini menunjukkan jumlah uang yang masih tersisa setelah pemerintah daerah menjalankan operasional pokoknya dan melakukan belanja modal dalam rangka menjaga kesinambungan pelayanan dan peningkatan kapasitas pelayanan. Arus kas bebas dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Arus Kas Bebas} = \text{Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi} - \text{Arus Keluar kas Aktivitas Investasi (Belanja Modal)}$$

